

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan mengenai peran para pemangku kepentingan dalam transformasi kebijakan transportasi online di Jawa Timur mulai dari masa Pelaksanaan Permenhub 108 Tahun 2017, dan masa transisi ke Peraturan yang baru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, studi dokumen dan wawancara mendalam dengan informan. Penentuan informan dilakukan secara *purposive* yaitu memilih pihak-pihak yang dianggap mengetahui lebih dalam mengenai perubahan Peraturan Transportasi Online di Jawa Timur yaitu sebanyak 18 informan. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi data. Kemudian untuk teknik analisis data dengan cara konseptualisasi, penyandian data kualitatif, penulisan memo analitis dan *outcropping*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses transformasi kebijakan transportasi online di Jawa Timur melibatkan dua belas pemangku kepentingan yang terdiri dari tiga pemangku kepentingan utama, tiga pemangku kepentingan kunci dan enam pemangku kepentingan pendukung. Kemudian pemangku kepentingan tersebut dikategorikan menjadi *key players*, *context sexter*, *subject* dan *crowd* berdasarkan derajat kepentingan dan pengaruhnya. Kementerian Perhubungan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Dinas Perhubungan bertindak sebagai *key players*. DPRD Jawa Timur bertindak sebagai *context sexter*. Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Timur, Polisi Daerah Jawa Timur dan juga kelompok kepentingan seperti Persatuan Driver Online Indonesia Jawa Timur, Organisasi Transportasi Darat Jawa Timur, Yayasan lembaga Perlindungan Konsumen Jawa Timur bertindak sebagai *subject*. Sedangkan, Akademisi bertindak sebagai *crowd*. Hubungan yang terjalin antarpemangku kepentingan berpotensi konflik, saling mengisi dan kerjasama. Dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan dan pemberlakuan peraturan transportasi online di Jawa Timur dibutuhkan kerjasama dan komunikasi yang baik dari semua pemangku kepentingan yang terlibat agar kebijakan bisa berkelanjutan dan tidak berubah-ubah.

Kata Kunci : Pemangku Kepentingan, Perubahan Kebijakan, Kebijakan Transportasi Online.

ABSTRACT

The pupose of this researh is to know and describe about the role of stakeholders in online transportation policy transformation in Jawa Timur start from Permenhub 108 Tahun 2017 implementation and transition to new policy. This Research used a qualitative method. While the techniques data collection is done by observation, study document and in-depth interviews with informan. Determination of informan conducted with a purposive technique. namely those that are considered to know more about the change of online transportation policy with 18 informan. Then, to ensure the validity of data in this research used the technique of triangulation. Then, to analyse data use conceptualitation, write analytical memo and outcropping.

The result of this research show that in transformation process of online transportation in Jawa Timur involve twelve stakeholder consists of three primary stakeholder, three key stakeholder and six secondary stakeholder. Then stakeholder categorized to key players, context sexter, subject and crowd based on the level of interest and influence. The Ministry of Transportation and the Ministry of Communication and Information and the Departement of Transportation East Java act as key players. East Java DPRD acts as a context sexter. The Departement Communication and Information East Java, The Departement of Manpower and Transmigration East Java, East Java Police and interest groups such as the East Java Indonesia Online Driver Association, East Java Land Transportation Organization, East Java Consumer Protection Foundation act as subject. Meanwhile, academics act as crowd. The potential relationships between stakeholders are potentially conflict, complementary and collaborative. In an effort to optimize the implementation and enforcement of online transportation regulations in East Java, good cooperation and communication from all stakeholders involved is needed so that policies can be sustainable and not change.

Keywords: Stakeholders, Change of Policy, Online Transportation Policy.